



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS GADJAH MADA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : INTANSARI NURJANNAH  
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN KEPERAWATAN JIWA  
3. NHK : 813548

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 320.000.000

1. Tanah Seluas 145 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 150.000.000  
2. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m2/99 m2 di KAB / KOTA  
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 48.000.000

1. MOBIL, MAZDA M 1400 VANTREND Tahun 1995, HASIL SENDIRI  
Rp. 20.000.000  
2. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.  
8.000.000  
3. MOTOR, HONDA V1J02Q32L0 A/T Tahun 2019, WARISAN Rp.  
20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 24.000.000

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 20.488.636

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 412.488.636

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 412.488.636

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.